

## DAFTAR PUSTAKA

- Agunggunanto, E. Y., Arianti, F., Kushartono, E. W., & Darwanto, D. (2016). Pengembangan desa mandiri melalui pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes). *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 13(1).
- Amin, A., Probondani Astuti, N., & Bongaya, S. (2021). *Akuntansi BUMDes di Desa Je'nemadinging Kabupaten Gowa. Jurnal Komunitas : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* (Vol. 3). Retrieved from <http://ojs.stiami.ac.id>
- Hamzah, A. P., Priharjanto, A., & Purwanti, D. (2019). Pendampingan Perancangan Kebijakan Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP Dalam Pelaporan Keuangan Pada BUMDES Tirta Mandiri, Desa Ponggok, Klaten. *KUAT: Keuangan Umum dan Akuntansi Terapan*, 1(3), 198-214.
- Ikatan Akuntansi Indonesia (2012), *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Indonesia, R. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun*, (21).
- Irawati, D., & Martanti, D. E. (2018). Transparansi pengelolaan laporan keuangan bumdes terhadap pelaporan aset desa (Studi fenomenologi pada BUMDes Desa Karangbendo Kec Ponggok Kab Blitar). *UNEJ e-Proceeding*, 41-51.

- Ismail, A. Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan anggaran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Kabupaten Luwu. Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan anggaran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Kabupaten Luwu.
- Kusrini, H. (2020). Analisis Penerapan SAK ETAP Pada Laporan Keuangan Bumdes Kamboja Desa Cinta Raja. Retrieved December 16, 2021, from <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jurnalfasosa/article/view/3575/3313>.
- La Suhu, B., Djae, R. M., & Sosoda, A. (2020). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Geti Baru Kecamatan Bacan Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan. *Jurnal Government Of Archipelago-Jgoa*, 1(1).
- Lintong, J. S., Limpeleh, E. A., & Sungkowo, B. (2020). Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP pada BUMDes “Kineauan” Desa Wawona Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan*, 16(1), 95-101.
- Nugrahaningsih, P., Falikhatun, F., & Winarna, J. (2016). Optimalisasi Dana Desa dengan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Des) Menuju Desa Mandiri. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 16(1), 37. <https://doi.org/10.20961/JAB.V16I1.190>
- Pakaya, N., Rorong, A., & Tulusan, F. (2019). Transparansi Pengolaan Badan Usaha Milik Desa (bumdes) di Desa Kamanga Kecamatan Tompaso. *Jurnal Administrasi PUBLIK*, 5(74).

- Permendesa PDTT No. 4. (2015). Pendirian, Pengurusan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. *Jakarta*, 1–65. Retrieved from [http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan\\_menteri\\_desa\\_pembangunan\\_daerah\\_tertinggal\\_dan\\_transmigrasi\\_nomor\\_22\\_tahun\\_2016](http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_22_tahun_2016)
- Posi, S. H., & Putra, S. P. A. M. (2021). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pemahaman Akuntansi Dan Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Terhadap Pelaporan Keuangan Bumdes Berdasarkan SAK ETAP. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 12(2), 463-469.
- Ridlwan, Z. (2014). Urgensi BUMDes dalam Pembangunan Perekonomian Desa. *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung*, 8(3), 424-440.
- Ridzal, N. A., & Hasan, W. A. (2020). Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebagai Penggerak Ekonomi Desa. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI*, 4(1), 98-106.
- Rindi, K., Dewi, L. P. M. S. A., Sari, D. A. P., & Awitiana, P. P. (2017). Penerapan Prinsip Akuntabilitas Pada BUMDes Teja Kusuma. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 7(1).
- Risal, R., Wulandari, R., & Jaurino, J. (2020). Pendampingan Akuntansi Dan Keuangan BUMDes Sedahan Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara. *Cendekia: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 49-57.

Rudini. (2016). Analisis Penerapan Sak Etap Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Langkitin Di Desa Langkitin.

Sidik, H. (2020). Meningkatkan Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penggerak Ekonomi8 Pedesaan Di Desa Langensari. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 21-30.

Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP). (2009). Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. *Standar Akuntansi Keuangan*, 6(Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI), 182.

Undang-Undang Nomor 6. (2014). Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia, (7). Retrieved from [www.djpp.kemenkumham.go.id](http://www.djpp.kemenkumham.go.id)

Widiastuti, H., Putra, W. M., Utami, E. R., & Suryanto, R. (2019). Menakar tata kelola badan usaha milik desa di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 22(2), 257-288.